



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 69 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a di atas, dan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab serta menindaklanjuti hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang, perlu dilakukan perubahan atas Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Peraturan ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sintang.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.
3. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
4. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sintang.
5. Indikator Kinerja Utama adalah dokumen yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang paling utama yang dapat dicapai baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sintang.
6. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
7. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu.

8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang untuk mencapai sasaran dan tujuan.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
10. Hasil Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan.
11. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
12. Pelaporan Kinerja adalah kegiatan manajemen untuk melaporkan hasil kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
13. Evaluasi Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan dan penilaian perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan hasil pengukuran kinerja, dan identifikasi analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang bertujuan untuk:

- a. menyusun perencanaan jangka menengah;
- b. menyusun perencanaan tahunan;
- c. menetapkan rencana kerja dan anggaran;
- d. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
- e. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

BAB III

SISTEM PENGUMPULAN DATA, PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 3

Setiap perangkat daerah wajib membangun sistem pengumpulan data indikator kinerja utama secara formal dan terstruktur dalam rangka mengukur kinerja yang menjadi tugasnya berdasarkan indikator kinerja dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Hasil kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sesuai indikator kinerja utama dilakukan oleh setiap pimpinan perangkat daerah dan wajib dilaporkan kepada Bupati setiap tahun yaitu pada akhir triwulan I melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektur.

Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Inspektorat diberikan tugas untuk:

- a. melakukan reviu atas capaian kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan dan keakuratan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
- b. melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan melaporkannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN KOORDINASI

Pasal 6

Pimpinan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan:

- a. pembinaan dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan perangkat daerah masing-masing;
- b. koordinasi untuk pengintegrasian sistem pengukuran kinerja dengan sistem administrasi pemerintahan lainnya baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Petunjuk Pelaksanaan yang belum diatur dan/ atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 8 OKTOBER 2018



Diundangkan di Sintang
pada tanggal 8 OKTOBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 NOMOR 72

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 69 TAHUN 2018

TANGGAL : 8 Oktober 2018

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

TAHUN 2016 - 2021

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dan Bersih pada Tahun 2021

- Misi :
1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal
 2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
 3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
 4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
 5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penanggung Jawab	Alasan/Kegunaan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya angka melek huruf dan tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun	1. Angka Melek Huruf (AMH)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Mengukur peningkatan angka tidak buta huruf bagi penduduk usia 15 tahun ke atas	Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Mengukur daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia tingkat SD/MI	Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3. Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Mengukur daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia tingkat SMP/MTs	Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD / MI	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Mengukur tingkat partisipasi penduduk yaitu proporsi anak sekolah aktif terhadap penduduk usia sekolah tingkat SD/MI	Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP / MTs	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Mengukur tingkat partisipasi penduduk yaitu proporsi anak sekolah aktif terhadap penduduk usia sekolah tingkat SMP/MTs	Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		6. Angka Partisipasi Murni (APM) SD / MI	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah tingkat SD/MI	Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penanggung Jawab	Alasan/Kegunaan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		7. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP / MTs	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah tingkat SMP/MTs	Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		8. Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Mengukur rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua pendidikan formal	Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Meningkatnya nilai budaya lokal	1. Jumlah grup kesenian	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Mengukur kinerja dalam rangka meningkatkan jumlah grup kesenian dan pagelaran seni budaya	Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Mengukur kinerja dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan nilai seni dan budaya melalui penyelenggaraan festival	Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3. Tingkat pengenalan budaya lokal pada jalur pendidikan formal dan informal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Mengukur kinerja dalam rangka pengenalan budaya lokal kepada masyarakat khususnya anak didik melalui pendidikan formal dan informal	Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak serta penduduk miskin	1. Angka Usia Harapan Hidup	Dinas Kesehatan	Mengukur angka atau umur perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk dalam kurun waktu tertentu	Laporan Hasil Survei/ Penelitian Badan Pusat Statistik
		2. Angka Kelangsungan hidup bayi (AKHB) per 1000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan	Mengukur probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun	Laporan Kinerja dan Profil Dinas Kesehatan
		3. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Dinas Kesehatan	Mengukur cakupan Ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Laporan Kinerja dan Profil Dinas Kesehatan
		4. Persentase Balita Gizi Buruk	Dinas Kesehatan	Mengukur kinerja dalam menemukan balita dengan status gizi buruk di satu wilayah pada kurun waktu 1 tahun	Laporan Kinerja dan Profil Dinas Kesehatan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penanggung Jawab	Alasan/Kegunaan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		5. Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	Dinas Kesehatan	Mengukur cakupan balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Laporan Kinerja dan Profil Dinas Kesehatan
		6. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Dinas Kesehatan	Mengukur cakupan Desa/Kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun	Laporan Kinerja dan Profil Dinas Kesehatan
		7. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+)	Dinas Kesehatan	Mengukur persentase jumlah penderita baru TBC BTA positif yang ditemukan dan diobati dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TBC BTA positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun	Laporan Kinerja dan Profil Dinas Kesehatan
		8. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	Dinas Kesehatan	Mengukur jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu	Laporan Kinerja dan Profil Dinas Kesehatan
		9. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Mengukur kinerja dalam meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat berupa puskesmas, poliklinik dan pustu per satuan jumlah penduduk	Laporan Kinerja dan Profil Dinas Kesehatan
		10. Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Mengukur kinerja dalam meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat berupa rumah sakit per satuan jumlah penduduk	Laporan Kinerja dan Profil Dinas Kesehatan
4.	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	1. Rasio Akseptor KB	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Mengukur kinerja dalam peningkatan pengguna akseptor KB untuk menekan laju pertumbuhan penduduk	Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penanggung Jawab	Alasan/Kegunaan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		2. Cakupan Peserta KB Aktif	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Mengukur kinerja dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga menuju keluarga sejahtera	Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		3. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Mengukur kinerja dalam pengawasan dan pembinaan kualitas hidup keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I menuju keluarga sejahtera	Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang	Dinas Pekerjaan Umum	Mengukur kinerja dalam meningkatkan fungsional atau berfungsinya jaringan jalan untuk kelancaran transportasi	Laporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum
		2. Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	Dinas Pekerjaan Umum	Mengukur kinerja dalam meningkatkan fungsional atau berfungsinya jaringan jalan untuk kelancaran transportasi	Laporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum
6.	Tersedianya sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pertanian (irigasi)	1. Rasio Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Dinas Pekerjaan Umum	Mengukur kinerja dalam meningkatkan fungsional atau berfungsinya jaringan irigasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi rumah tangga, pertanian, industri dan lainnya	Laporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum
		2. Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	Dinas Pekerjaan Umum	Mengukur kinerja dalam penyediaan jaringan irigasi sehingga terjangkau untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi rumah tangga, pertanian, industri dan lainnya	Laporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum
7.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)	1. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih/Minum (PDAM)	Dinas Pekerjaan Umum	Mengukur kinerja dalam peningkatan penyediaan akses air bersih/minum (PDAM) untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat	Laporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan PDAM
		2. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	Dinas Lingkungan Hidup	Mengukur banyaknya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang dapat disediakan dan terjangkau oleh masyarakat dalam satu wilayah tertentu	Laporan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penanggung Jawab	Alasan/Kegunaan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		3. Persentase Penanganan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Mengukur banyaknya volume sampah yang dapat diangkut dalam jangka waktu tertentu dalam suatu wilayah	Laporan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
8.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Tingkat Pencemaran Udara	Dinas Lingkungan Hidup	Mengukur kualitas udara dari pencemaran untuk menjamin kualitas lingkungan hidup	Laporan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
		2. Pencemaran Status Mutu Air (14 Sungai)	Dinas Lingkungan Hidup	Mengukur tingkat pencemaran mutu air pada 14 sungai di Kabupaten Sintang untuk menjamin kualitas air yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Laporan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
9.	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	1. Rasio Tempat Ibadah per 100.000 penduduk	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Mengukur banyaknya pembangunan tempat ibadah yang dapat diberikan bantuan sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam beribadah dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama	Laporan Kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
10.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	1. Nilai Toleransi antara Pemeluk Agama	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Mengukur kinerja pemerintah dalam menjaga kerukunan antar umat beragama untuk saling hormat menghormati dan cepat dalam menyelesaikan masalah jika terjadi konflik atau isu sara	Laporan Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
11.	Meningkatnya perekonomian daerah	1. Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Mengukur peningkatan pendapatan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah	Laporan Kegiatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah
12.	Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan lokal dan lapangan pekerjaan	1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) = 195 Buah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Mengukur kinerja dalam upaya menarik investor berskala nasional untuk menanamkan modalnya di daerah	Laporan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) = Rp. 1.349,13 M	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Mengukur kinerja dalam upaya meningkatkan nilai investasi berskala nasional yang dapat diinvestasikan di daerah	Laporan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penanggung Jawab	Alasan/Kegunaan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		3. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN = Rp. 250 M	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Mengukur tingkat kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN dalam kurun waktu tertentu agar dapat diambil suatu kebijakan	Laporan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		4. Angka Partisipasi Angkatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Mengukur tingkat partisipasi tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi yaitu bekerja dan mencari pekerjaan	Laporan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		5. Tingkat Pengangguran Terbuka	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Mengukur banyaknya jumlah penduduk usia angkatan kerja yang terindikasi atau termasuk dalam kelompok pengangguran	Laporan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13.	Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah dan terwujudnya sentra pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan lokal	1. Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Mengukur besarnya kontribusi sektor industri yang diberikan terhadap PDRB di daerah setiap tahun	Laporan Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		2. Persentase Produk Usaha Kecil dan Menengah yang bersertifikat	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Mengukur produk Usaha Kecil Menengah yang telah bersertifikat untuk menjamin kualitas dan standar produk yang dihasilkan Usaha Kecil dan Menengah	Laporan Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		3. Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Mengukur besarnya kontribusi sektor perdagangan yang diberikan terhadap PDRB di daerah setiap tahun	Laporan Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
14.	Meningkatnya peran koperasi, UMKM, dan lembaga keuangan non perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat	1. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Mengukur upaya pembinaan kelompok pedagang/usaha informal untuk menjamin perlindungan konsumen, pengamanan perdagangan, kelangsungan dan peningkatan usaha perdagangan/ informal	Laporan Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penanggung Jawab	Alasan/Kegunaan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		2. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Mengukur kinerja dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro dan kecil di daerah dalam jangka waktu tertentu	Laporan Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		3. Persentase Koperasi Aktif	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Mengukur banyaknya koperasi yang aktif melakukan kegiatan usahanya dan rapat anggota tahunan dalam jangka waktu tertentu	Laporan Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
15.	Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian dan perkebunan di desa serta meningkatnya ketahanan pangan	1. Nilai Tukar Petani	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Mengukur tingkat pendapatan petani setiap tahun yang berasal dari sektor usaha pertanian	Laporan Kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan
		2. Jumlah Produksi Padi per tahun	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Mengukur kinerja dalam peningkatan produksi jagung guna memenuhi swasembada pangan di daerah setiap tahun	Laporan Kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan
		3. Jumlah Produksi Jagung per tahun	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Mengukur kinerja dalam peningkatan produksi padi guna memenuhi swasembada pangan di daerah setiap tahun	Laporan Kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan
		4. Persentase Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Mengukur besarnya kontribusi sektor pertanian/perkebunan yang diberikan terhadap PDRB di daerah setiap tahun	Laporan Kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan
		5. Produktivitas Karet per tahun	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Mengukur kemampuan/daya dalam peningkatan produksi karet guna memenuhi komoditas karet di daerah setiap tahun	Laporan Kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan
		6. Produktivitas Kelapa Sawit per tahun	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Mengukur kemampuan/daya dalam peningkatan produksi kelapa sawit guna memenuhi komoditas kelapa sawit di daerah setiap tahun	Laporan Kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan
		7. Produktivitas Lada per tahun	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Mengukur kemampuan/daya dalam peningkatan produksi lada guna memenuhi komoditas lada di daerah setiap tahun	Laporan Kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penanggung Jawab	Alasan/Kegunaan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		8. Produktivitas Kakao per tahun	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Mengukur kemampuan/daya dalam peningkatan produksi kakao guna memenuhi komoditas kakao di daerah setiap tahun	Laporan Kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan
		9. Produktivitas Kopi per tahun	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Mengukur kemampuan/daya dalam peningkatan produksi kopi guna memenuhi komoditas kopi di daerah setiap tahun	Laporan Kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan
		10. Jumlah Produksi Peternakan (daging) per tahun	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Mengukur kinerja dalam peningkatan produksi daging asal ternak guna memenuhi swasembada daging di daerah setiap tahun	Laporan Kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan
		11. Jumlah Produksi Perikanan per tahun	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Mengukur kinerja dalam peningkatan produksi ikan guna memenuhi kebutuhan akan ikan di daerah setiap tahun	Laporan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		12. Luas Kebun : - Karet - Kelapa Sawit - Lada - Kakao - Kopi	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Mengukur besaran luas masing-masing kebun guna perencanaan kegiatan perluasan komoditas perkebunan di daerah	Laporan Kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan
		13. Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Mengukur ketersediaan pangan utama dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain yang berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat	Laporan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		14. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Mengukur kinerja dalam penyediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah sebagai cadangan pangan di daerah	Laporan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
16.	Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penetapan APBD tepat waktu	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Mengukur kinerja pemerintah daerah dalam menyusun rancangan APBD sehingga dapat ditetapkan menjadi Perda APBD tepat waktu setiap tahun	Laporan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penanggung Jawab	Alasan/Kegunaan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		2. Opini WTP dari BPK	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Mengukur kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit yang dilakukan oleh BPK-RI setiap tahun	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
17.	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Ketersediaan sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Mengukur kinerja dalam penyediaan sistem informasi pelayanan perijinan terpadu dan administrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Laporan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	Mengukur kinerja pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah terkait kasus-kasus konflik pertanahan khususnya menyangkut tanah aset pemerintah daerah	Laporan Hasil Evaluasi atas AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		3. Persentase Hasil Musrenbang yang terakomodir dalam RPJMD / RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Mengukur peningkatan pemanfaatan database kependudukan oleh instansi terkait sehingga dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan	Laporan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
18.	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, stabilitas keamanan dan ketertiban umum.	1. Cakupan Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Mengukur kinerja Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah	Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

